

GERAKAN SOSIAL KAUM SANTRI MELAWAN RENCANA PENAMBANGAN DI PASEBAN

M. Khusna Amal

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

iza_jbr@yahoo.com

Abstract

This paper examines the involvement of santri in protesting against the government's policy on the exploration of iron sand mines in Paseban, Jember. The study has shown that the protests by the santri in fact have a pluralistic goals, including a counter to government policies that are considered more pro-capitalists, protect the fate of the grassroots community from the impact of mining, and maintain coastal ecological sustainability. Another interesting finding is that santri use religion in their protest not merely as a theological weapon, but rather as a source of ethics, morals and spirit of resistance. Of course, this fact can corrects the commodification theory which always sees the use of religion by agencies in relation to the struggle to accumulate capital.

Keywords: *Resistance, Santri, Sosial Movement, Civil Society, Mining, and Democracy*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji keterlibatan kaum santri dalam melakukan aksi protes terhadap kebijakan pemerintah atas eksplorasi tambang pasir besi di Paseban, Jember. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa aksi protes yang dilakukan oleh kaum santri pada kenyataannya memiliki tujuan yang plural di antaranya ialah melawan kebijakan pemerintah yang dinilai lebih pro-pemodal, melindungi nasib warga masyarakat akar rumput dari dampak penambangan, dan menjaga kelestarian ekologi pesisir. Temuan yang tidak kalah menarik ialah bahwa dalam melakukan aksinya, kaum santri menggunakan agama bukan sebatas sebagai senjata teologis, melainkan lebih sebagai sumber etik, moral dan spirit perlawanan. Fakta demikian ini turut mengoreksi teori komodifikasi yang senantiasa melihat pemanfaatan agama oleh agen-agennya dalam kaitannya dengan perjuangan dalam mengakumulasi modal.

Kata Kunci: *Perlawanan, Kaum Santri, Gerakan Sosial, Civil Society, Tambang, dan Demokrasi*

Pendahuluan

Sepak terjang kaum santri dalam gerakan sosialnya yang berkaitan dengan isu-isu kerakyatan seperti kemiskinan, ketidakadilan, hak asasi manusia (HAM), toleransi, pluralisme dan demokrasi, sempat menjadi perhatian serius para ilmuwan, terutama pada dekade 1980-1990-an. Saat itu, aktivitas kaum santri dalam dunia NGOs (Non Government Organizations), sebagai akibat dari kebijakan depolitisasi rezim Orde Baru, cukup tinggi. Gerakan sosial mereka disebut-sebut telah merambah jalan baru dengan mengambil bentuk, sarana, dan orientasi gerakan yang tidak lagi tunggal, melainkan plural. Mengikuti pendapat Singh, gerakan sosial baru, ditentukan oleh keragaman dalam hal pencarian tujuan, sarana dan orientasi yang berbasis pada heterogenitas sosial (Singh, 2001: 101-103).

Sementara itu, keterlibatan kaum santri dalam berbagai gerakan sosial tidak bisa dilepaskan dari agama. Berbeda dari pandangan yang cenderung menempatkan agama sebagai problem dalam gerakan perubahan sosial, sebagaimana kaum Marxisme memahami agama sebagai sumber legitimasi dan penindasan kelas dominan (Kurniawan dan Puspitorini, 2012: 82) ataupun Islamisme yang menjadikan agama sebatas sebagai ideologi untuk meraih dan mengislamkan kekuasaan, tulisan ini justru melihatnya dari sisi yang lebih positif. Dalam kasus gerakan agama Kristen primitif dan sosialisme modern, misalnya, agama lebih berfungsi sebagai alat perjuangan kaum tertindas dan teraniaya. Menurut Engels, keduanya sama-sama bertujuan untuk membebaskan manusia dari belenggu keter-tindasan dan ketidakadilan. Perbedaannya, Kristen primitif mengalamatkan pembebasan pada kehidupan alam akherat kelak, sedangkan sosialisme cenderung menempatkannya pada kehidupan di dunia saat ini (Kurniawan dan Puspitorini, 2012: 83).

Demikian halnya dengan Islam, agama ini kerap pula menampilkan sisi progresif dalam gerakan sosialnya. Menurut

Asghar Ali Engineer, Islam diartikulasikan oleh sebagian pengikutnya sebagai (bukan sebatas ajaran normatif) teologi pembebasan. Dalam konteks ini, Islam tidak menginginkan status quo yang memihak kepada golongan kaya dalam berhadapan dengan golongan miskin. Kehadiran Islam justru memainkan peran sebagai pembela kelompok yang tertindas (*mustadz'afin*) dan tercerabut hak miliknya, serta memperjuangkan kepentingan kelompok ini dan membekalinya dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan dan/atau mengimbangi kekuatan yang menindasnya. Islam tidak hanya mengakui satu konsep metafisika tentang takdir dalam sejarah kehidupan umat Islam, namun juga mengakui konsep bahwa manusia itu memiliki kemampuan dan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri (Engineer, 2009: 1-2).

Dalam konteks gerakan sosial di Indonesia, agama kerap pula menampilkan watak progresifnya sebagai sumber etik, nilai, pengetahuan, legitimasi dan bahkan ideologi perlawanan. Para elit agama, kiai, dan pimpinan tarekat menjadikan otoritas dan jaringan keagamaan yang dimilikinya, untuk menggerakkan masyarakat guna melakukan perlawanan (*jihād*) terhadap dominasi kaum kolonial. Tidak jarang pula agama digunakan masyarakat kelas bawah sebagai kekuatan supranatural yang bersifat mitologis, baik untuk bertahan ataupun melawan berbagai situasi dan kondisi yang mensubordinasikannya. Gerakan Mesianisme atau Ratu Adil dapat dipandang sebagai eksemplar dari aksi-aksi protes masyarakat bawah, yang menggunakan spirit mitologis keagamaan (Kartodirdjo, 1984; Kuntowijoyo, 2002).

Sementara itu, Robert W. Hefner memberikan catatan khusus terkait peran progresif Islam dalam konteks Indonesia pasca kolonialisme. Melalui asosiasi kewargaan (Hefner menyebutnya dengan istilah *civil Islam*) yang dimotori oleh tokoh-tokoh intelektual Muslim berhaluan liberal-progresif, Islam telah berhasil menampilkan diri sebagai kekuatan reformis dalam mendesakkan perubahan sosial. Sepanjang periode 1980-

an sampai 1990-an, Islam benar-benar menjelma menjadi kompetitor paling tangguh bagi dominasi rezim otoritarianisme Orde Baru. Di tangan aktivis Muslim progresif, Islam berhasil menjelma menjadi kekuatan reformis yang lantang mendesak agenda toleransi, pluralisme, hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi (Hefner, 2000 & 2001: 498).

Kendatipun sudah banyak tulisan yang mengulas kaitan antara agama dan gerakan sosial, namun belum semuanya memberikan ulasan komprehensif mengenai peran agen-agen agama dalam konteks Indonesia era demokrasi. Menonjolnya pendekatan Marxian membuat studi-studi yang ada, lebih banyak mengelaborasi dimensi materialisme-struktural sebagai variable-variabel yang secara determinan berperan penting dalam mendorong agen-agen agama untuk melakukan gerakan sosial. Tulisan ini cenderung mengikuti cara pandang progresif yang melihat (ide-ide) agama berkontribusi penting dalam setiap gerakan perubahan sosial. Mengutip pendapat Jose Casanova, tidak semua ekspresi agen-agen agama adalah konservatif ataupun eksklusif, sebaliknya agama di tangan mereka dapat menjadi bagian penting dari kekuatan politik progresif untuk mendesakkan perubahan dan demokratisasi (Casanova, 1994).

Spesifik, tulisan ini bermaksud mengkaji pergulatan kaum santri dalam gerakan perubahan sosial di Indonesia era demokrasi. Persoalan ini cukup menarik jika dikaitkan dengan dominasi kajian-kajian gerakan keagamaan yang melihat potensi destruktif dari agama dalam mendorong gerakan perubahan sosial dan demokratisasi. Topik kajian juga dinilai cukup relevan jika dikaitkan dengan sejumlah kritik terhadap kecenderungan konservatisme dan pragmatisme dalam gerakan sosial yang dipelopori oleh aktivis NGOs, termasuk kaum santri. Bagaimanapun, kehadiran kaum santri dalam aksi penolakan tambang di Paseban, menjadi semacam anti-tesa terhadap pandangan-pandangan sebelumnya yang cenderung

menilai santri konservatif dan pragmatis dalam gerakan sosialnya.

Islam dan Gerakan Sosial Baru

Teori sekularisme memprediksikan jika agama akan tenggelam dan tidak punya peran penting dalam ruang publik seiring dengan pertumbuhan modernisasi di berbagai belahan dunia. Para penganut teori ini berpendapat bahwa agama akan semakin terprivatisasikan, termarginalkan, dan secara politik kian tidak relevan. Tiga tesis utama dari teori sekularisme yang sangat populer adalah, pertama, dikenal dengan tesis diferensiasi, suatu konseptualisasi modernisasi sebagai proses diferensiasi dan emansipasi fungsional ruang sekuler—negara, ekonomi, pengetahuan—dari ruang agama. Kedua, dan yang merupakan sub-tesis dari tesis pertama adalah usaha untuk menjelaskan hasil dari proses sekularisasi, salah satunya tesis tentang kemerosotan agama. Ketiga, dikenal dengan tesis privatisasi, mempostulasikan bahwa proses sekularisasi akan membawa privatisasi dan marginalisasi agama dalam dunia modern (Casanova, 1994: 3-6; 2001: 1041).

Dalam kenyataannya, apa yang diprediksikan oleh kalangan sekularisme tersebut tidaklah sepenuhnya tepat. Alih-alih termarginalisasikan, agama justru semakin eksis dan memainkan peran penting dalam kehidupan publik. Jose Casanova, dalam karyanya *Public Religion in the Modern World* memberikan ulasan mendalam tentang peran agama dalam ruang publik di era modern. Menurutnya, agama terus mengalami proses deprivatisasi melintasi dunia global. Agama, sebagai realitas diskursif, telah menjadi fakta sosial global yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Agama memainkan peran penting dalam tiga area berbeda dari politik demokratik modern; negara, masyarakat politik dan masyarakat sipil (Casanova, 2010).

Di berbagai belahan dunia, termasuk dunia Muslim, perkembangan modernisasi yang didesain oleh Barat, justru berimplikasi pada kebangkitan dan kelahiran kembali agama (Islam). Daniel Lerner, misalnya, dalam buku klasiknya *The*

Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East menjelaskan bahwa pemerintah adidaya merancang politik modernisasi ke negara-negara dunia berkembang, termasuk negara-negara Muslim di Timur Tengah. Tujuannya bukan semata-mata untuk memodernkan ataupun menyekulerkan Arab melalui proyek pembangunan dan demokrasi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan kultural. Harapannya, dengan membangun dan memodernisasikan masyarakat berkembang dan terbelakang –tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga Asia dan Afrika—negara-negara itu dapat kebal dari pengaruh komunisme dan sekaligus mendukung kapitalisme. Bagaimanapun, proses modernisasi ekonomi dan politik di Dunia Ketiga, tidak dapat dipisahkan dari kampanye global Amerika untuk membendung ideologi komunisme Soviet (Al-Qurtuby, 2013).

Satu hal yang tidak pernah diantisipasi oleh para ahli modernisasi adalah bahwa proses modernisasi itu ternyata membuahkan hasil berupa kebangkitan Islam dan politik Muslim. Dalam konteks ini, kemunculan pembaruan Islam tidak hadir dalam ruang hampa atau secara sederhana dipahami sebagai produk pemahaman dan penafsiran teologis dari kalangan Islam politik. Menurut Said Arjomand, fenomena kebangkitan Islam dan terutama Islam publik di Timur Tengah, Asia dan Afrika, dipengaruhi oleh modernisasi dan pembangunan negara-bangsa (*state-nation*), serta mobilitas politik. Singkatnya, politik modernisasi dan sekularisasi telah berkontribusi, langsung maupun tidak langsung, terhadap politik Islam, termasuk kemunculan Islam public (Al-Qurtuby, 2013).

Di Indonesia sendiri, keberadaan agama tidak pernah berhasil diprivatisasikan oleh agen-agen modernisme atau sekularisme. Sejak periode kolonialisme dan pasca kolonialisme yang ditandai oleh dinamika modernisasi dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, fungsi dan peran agama semakin vital dalam ruang publik Indonesia modern. Agama tidak sebatas

berfungsi sebagai teologi ketuhanan yang bersifat normatif dan ritualistik. Lebih dari itu, agama berfungsi pula sebagai teologi yang berurusan dengan problematika kehidupan masyarakat. Para sarjana Islam sendiri seperti Azyumardi Azra, Robert Hefner, Asef Bayat, John Esposito, dan lainnya, telah menemukan bukti kuat terhadap kaitan antara Islam, gerakan sosial, dan demokrasi di negara-negara Muslim, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks demikian itu, agama telah diterjemahkan oleh para pemeluknya tidak sebatas sebagai teologi ketuhanan yang bersifat normatif-metafisik, melainkan juga sebagai teologi kemanusiaan yang bersifat empiris dan historis. Dalam banyak kasus, agama bisa dimanfaatkan oleh umatnya sebagai sumber pengetahuan, sistem nilai, etika dan bahkan ideologi yang mampu menjadi suatu 'kontra diskursus' atau 'kontra hegemoni' terhadap ideologi dan tindakan-tindakan dominatif (Kleden, 1985: 215). Selama periode kolonial, agama terbukti mampu menjadi simbol, spirit dan bahkan teologi perlawanan rakyat dari segala bentuk penindasan yang dilakukan rezim negara kolonial. Terbaru, agama cukup efektif digunakan oleh umatnya yang berhaluan progresif untuk menggalang kekuatan dalam rangka melancarkan aksi-aksi sosial transformatif. Hasilnya, gerakan reformasi 1998 yang mendapatkan dukungan kuat dari elemen-elemen sipil Islam, berhasil melengserkan rezim otoritarianisme Suharto (Hefner, 2000).

Sementara itu, aksi-aksi kolektif yang dilakukan oleh para aktivis Muslim di Indonesia sejak 1980-an, tidak lagi dicirikan oleh perjuangan kelompok ataupun kelas sosial. Sekalipun kepentingan kelompok masih ada, namun orientasi gerakan mereka sudah merambah pada kepentingan yang lebih besar seperti pemberdayaan masyarakat sipil, perubahan sosial dan demokratisasi. Dalam diskursus teori gerakan sosial, aksi-aksi mereka itu sudah merambah ke model apa yang populer dengan sebutan gerakan sosial baru (GSB). Dikatakan demikian, karena gerakan sosial mereka itu ditandai oleh, pertama,

ruang *civil society* semakin berkurang keberdayaannya karena kuatnya kontrol negara dan ekspansi pasar yang berakibat pada *self defence* dalam komunitas untuk menentang hal tersebut. Kedua, gerakan yang meraka lancarkan bukan lagi didasarkan pada kepentingan kelas dan sekaligus menekankan isu-isu non-materialistik. Ketiga, umumnya gerakan yang dilancarkan aktivis santri itu mengembangkan politik akar rumput, gerakan mikro dari kelompok-kelompok kecil, membidik isu-isu lokal dengan dasar kelembagaan yang terbatas. Keempat, struktur gerakan yang dilakukan kalangan aktivis santri ditentukan oleh pluralitas pencarian tujuan, sarana dan orientasi yang berbasis pada heterogenitas sosial. Konsekuensinya, berbagai aksi sosial adalah plural, mengikuti berbagai jejak, mengejar tujuan berbeda dan menyuarakan kepentingan yang beragam (Singh, 2001: 102-103).

Kala Paseban Butuh Keberpihakan

Paseban merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Jember bagian Selatan dengan karakter ekologi pesisir. Desa ini memiliki luas wilayah 844,243 Ha dan jumlah penduduk mencapai 7592 jiwa (3759 laki-laki dan 3833 perempuan). Sebagaimana warga pesisir, masyarakat Paseban rata-rata memiliki pandangan dan kepercayaan bahwa laut Selatan tidak hanya dipahami semata-mata sebagai sumber kehidupan (dalam pengertian ekonomi), terutama nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sumberdaya laut. Lebih dari itu, warga memandang lautan dan pesisirnya tidak ubahnya sebagai suatu kawasan kosmologis yang sarat dengan makna mistis. Pada umumnya, warga memercayai keberadaan makhluk lain (ghaib) yang menghuni dan menguasai pantai Selatan. Karena itu, warga memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap kawasan pesisir dengan cara menjaga, merawat dan meruwatnya. (Tuwas, Faisol, dan Irfanudin, Wawancara, 26 Oktober 2016)

Mitos yang berkembang dan dipercaya oleh sebagian warga masyarakat Paseban ialah bahwa kawasan pesisir pantai

Selatan itu, berada di bawah kekuasaan Sang Ratu. Dikisahkan, suatu hari ada tokoh desa yang bermimpi bertemu dengan Sang Ratu yang memberikan informasi jika desa Paseban akan diterpa badai dahsyat semacam tsunami. Sang Ratu meminta agar warga mau memberikan sesajen berupa intan dan ditanam di sebuah tempat bernama Kedung Garinten (gaib/tidak tampak). Atas dasar itulah, warga masyarakat Paseban kemudian melakukan ruwatan dengan menanam intan (sekarang diganti dengan kepala kambing) dan aneka sesajen di pesisir pantai Paseban, tepatnya di lokasi yang dipercaya sebagai Kedung Garinten. Hingga kini ruwatan khas pesisiran itu, masih dilestarikan oleh warga Paseban dan diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Tuwas, Faisol, dan Irfanudin, Wawancara, 26 Oktober 2016)

Selain itu, ruwatan yang dilakukan oleh warga masyarakat Paseban terhadap kawasan pantai Selatan dan pesisir, diwujudkan pula dalam bentuk upacara petik laut, suatu ritual dan tradisi khas pesisir. Setiap tahun para nelayan beserta warga Paseban melaksanakan upacara petik laut dengan melarung sesajen berupa aneka jenis makanan (berupa hasil laut dan bumi), ke tengah lautan. Bagi sebagian nelayan, sesajen tersebut dimaksudkan sebagai persembahan, tanda ucapan terima kasih, untuk penguasa laut pantai Selatan. Bagi sebagian warga lainnya yang santri, sesajen yang dilarung ke tengah lautan itu, tidak lebih sebagai ekspresi tanda syukur mereka kepada Allah, atas berkah dan limpahan karunia rizki-Nya. Ruwatan petik laut juga dimaksudkan agar pekerjaan yang mereka lakukan baik di laut maupun di daratan, bertambah lancar, mendapatkan keberkahan, keselamatan dan dijauhkan dari berbagai bentuk marabahaya yang bersumber dari lautan. (Soleh, Wawancara, 15 Nopember 2016)

Pesisir yang menjadi kawasan wisata (pantai Paseban), sumber mata pencaharian, dan sekaligus tradisi bagi warga desa, ternyata memiliki potensi sumberdaya alam terutama pasir besi yang melimpah. Menurut catatan Dinas Perindustri-

an dan Perdagangan (Disperindag), kabupaten Jember sejatinya memiliki potensi tambang yang cukup beragam. Di antara yang sangat potensial dan menarik minat para investor nasional adalah tambang emas, mangan dan bijih pasir besi. Di sepanjang wilayah pegunungan dan hutan lindung mulai dari Silo, Ambulu, Wuluhan dan sebagian pesisir Selatan, termasuk Paseban, terdapat kandungan emas, mangan, dan bijih pasir besi yang cukup besar. (Wawancara, 21 Nopember 2016)

Di sepanjang pantai Selatan tersebut, rata-rata endapan pasir besi terakumulasi dalam gundukan pasir (sand dune) yang dapat mencapai tinggi hingga 6 meter di atas permukaan laut. Sedangkan lebarnya mencapai 100 meter sampai 1000 meter dari pantai permukaan. Endapan ini bersifat material lepas dengan warna umumnya abu-abu kehitaman. Luas lahan prospek pasir ini sekitar 462,5 ha dan mencapai sekitar 23.125.000 m³ dengan asumsi kedalaman penambangan 5 meter. Dari hasil analisis diketahui bahwa besar butir atau fraksi endapan pasir besi dipantai selatan sebenarnya antara 40-200 mesh dengan kadar masing-masing fraksi antara 30-60%. Secara rinci, cadangan pasir besi yang terkandung di pesisir pantai Selatan Jember yang tersebar di kecamatan Puger, Gumuk Mas dan Kencong (termasuk di dalamnya desa Paseban) dapat dijelaskan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1

Perhitungan Cadangan Pasir Besi di Kabupaten Jember Menurut Dune

Dunes	Ton Concentrates	Rata-rata % Fe	Rata-rata % TiO ₂
Dalam	6.671.534	51,31	7,56
Tengah	612.470	51,15	7,18
Pinggir pantai	2.094.275	51,27	8,23
Total	9.378.279	51,29	7,71

Sumber : <http://bpm.jatimprov.go.id>

Menimbang potensi pasir besi di Paseban itu, maka tidak sedikit investor yang tergiur untuk mengeksplorasinya. Menurut data Disperindag Kabupaten Jember, sejumlah investor yang sudah mengajukan investasi penambangan pasir besi di Paseban antara lain ialah PT. Sari Mapan Sejahtera, PT. Paseban Makmur Sejahtera, PT. Karya Samudra Indonesia, PT. Klan Asia Mining, PT. Agtika Sejahtera, PT. Indo Modern Mining Sejahtera, PT. Sarang Madu Perkasa, PT. Surya Mas Jaya Sakti, dan PT. Agung Bogor Perkasa. (Wawancara, 21 Nopember 2016)

Intervensi Rezim Ekonomi-Politik

Cukup jelas bahwa penambangan pasir besi di Paseban merupakan bagian dari kebijakan pemerintah kabupaten untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Agenda penambangan sudah lama direncanakan, namun belum kunjung dapat dilaksanakan oleh pihak investor karena kendala persyaratan yang belum terpenuhi. Baru pada 2009, pemerintah Kabupaten Jember melalui Disperindag mengeluarkan izin eksploitasi kepada PT. Agtika Dwi Sejahtera. Selanjutnya, pihak pemerintah kabupaten bersama-sama dengan calon investor dan desa, melakukan koordinasi untuk membahas rencana penambangan tersebut. Hanya saja, rapat tersebut tidak menghasilkan keputusan apakah penambangan segera dapat dilakukan atau tidak. (Wawancara, 21 Nopember 2016)

Baru pada 2008, aktivitas penambangan mulai menampakkan jejaknya ketika PT. Agtika Dwi Sejahtera mengambil sampel pada bulan Desember dengan berbekal surat nomor: 541.3/056/436.314/2008 yang ditujukan kepada Soedarsono Sugih Slamet, selaku komisaris utama. Surat itu berisi perihal izin untuk keperluan pengambilan sample testing terakhir sebelum mesin-mesin berat dikirim ke desa. Setelah selesai uji sampel dan dinyatakan memiliki nilai investasi, pada tanggal 21 Januari 2009 pemerintah kecamatan dan pihak investor mengundang pihak desa di kantor kecamatan Kencong untuk melakukan rapat terkait dengan rencana penambangan

sekaligus sosialisasi tata kelola atau sharing hasil tambang dengan pihak desa. (Lasidi, Wawancara, 26 Oktober 2016)

Meskipun pada pertemuan tersebut belum ada kesepakatan dan keputusan antara pihak desa dan investor terkait penambangan, pihak pemerintah Kabupaten Jember tidak menyurutkan niat untuk merealisasikan rencana penambangan. Pada 2009, Pemkab menunjuk PT. Agtika Dwi Sejahtera dengan mengeluarkan surat nomor: 641.31/00/438.314/2009 perihal izin eksploitasi pasir besi (www.gnkl-jember.blogspot.com). Atas dasar surat ini, PT. Agtika Dwi Sejahtera secara resmi telah menjadi investor dan berhak melakukan eksploitasi pasir besi yang berlaku selama lima tahun sesuai dengan kontrak.

Pasca rapat di kantor kecamatan Kencong sebelum investor mengambil sampel, tidak ada tindak lanjut semacam pertemuan ataupun sosialisasi membahas rencana penambangan dari pihak pemerintah kabupaten Jember. Keberadaan PT. Agtika Dwi Sejahtera menimbulkan kecurigaan masyarakat dan akibatnya mulai muncul desas desus, obrolan, rasan-rasan, pembicaraan-pembicaraan sampai menjadi topik sehari-hari masyarakat. Dalam obrolan keseharian itu, warga masyarakat menunjukkan ketidaksepakatan, kekhawatiran dan bahkan kecurigaan terhadap keluarnya izin eksploitasi pasca pertemuan Januari 2009 yang membahas rencana penambangan dan *sharing* penghasilan yang tidak menghasilkan kesepakatan. Kecurigaan warga bukan tanpa alasan mengingat dalam rapat multipihak itu (pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa), belum menghasilkan kesepakatan sama sekali, akan tetapi izin eksplorasi tetap saja diterbitkan. Warga mencurigai ada permainan antara pihak investor dan aparat pemerintah (termasuk pemerintah desa), sehingga izin eksploitasi dikeluarkan. (H. Harun, Wawancara 7 September 2016)

Dalam kondisi yang tidak menentu itu, masyarakat pun mulai bergejolak dan mencurigai oknum aparat desa yang ikut bermain dalam penerbitan izin tambang. Meski sebagian warga masyarakat ada yang setuju dengan rencana penam-

bangun dan sebagian lainnya cenderung mengambil sikap diam, namun sebagian besarnya justru bersikap tegas dengan menolak keberadaan aktivitas penambangan. Kecurigaan dan kekhawatiran masyarakat memuncak dengan melakukan tuntutan kepada perangkat desa untuk melakukan rapat koordinasi. Pada tanggal 20 Oktober 2009, aparat desa, Badan Pemberdayaan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat, melakukan rapat koordinasi menyikapi kekhawatiran masyarakat terhadap rencana penambangan yang dilakukan investor. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesamaan sikap, yaitu menolak penambangan pasir besi. Selanjutnya, pada 22 oktober 2009, kepala desa mengundang masyarakat luas untuk menso-sialisasikan hasil rapat sebelumnya, tanggal 20 Oktober 2009. (Lasidi, Wawancara 26 Oktober 2016)

Kaum Santri Menjadi Aktor Gerakan

Di tengah sorotan dan kritik tajam berbagai pihak terhadap kaum santri pasca Orde Baru yang dinilai konservatif, pragmatis, dan terpolarisasi mengikuti garis kepentingan politiknya, setidaknya peran yang ditampilkan kaum santri dalam aksi-aksi protes menolak tambang di Paseban, bisa menjadi antitesa dari cara pandang mainstream tersebut. Di tengah gelombang pragmatisme yang hampir melanda semua kelompok sosial, tidak terkecuali kaum santri, masih terdapat sejumlah kecil dari mereka yang menampilkan pilihan berbeda. Sejumlah kecil dari kaum santri ini mengambil jalan tidak saja populis, terlibat dalam aksi-aksi protes terhadap kebijakan pemerintah soal tambang yang dinilai tidak demokratis. Sulit dinafikan jika keterlibatan mereka dalam gerakan sosial tersebut, sebatas permainan politik dengan target jangka pendek.

Kalaupun langkah kaum santri itu dinilai hanya sebagai bentuk perpolitikan praktis, maka intervensi dari pihak penguasa dan pemilik modal yang menawarkan keuntungan material dan kekuasaan, dapat membuahkan hasil berupa domestikasi gerakan sosial kontra tambang. Faktanya berbagai manuver elit-politik tidak memberikan dampak besar terhadap

terceraiberainya kekuatan oposisi. Saat bersamaan, aktivitas penambangan oleh investor yang jelas-jelas sudah mendapatkan legalitas dan legitimasi dari ruling elites dan mendapatkan pengawasan dari pihak keamanan negara, juga tidak bisa direalisasikan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua elemen santri di Jember yang terlibat aktif dalam gerakan sosial kontra tambang di Paseban. Elit agama di tingkat lokal (pedesaan) merupakan salah satu aktor penting dalam gerakan kontra-tambang. Sebagai catatan, di Paseban sendiri terdapat tokoh-tokoh agama, terutama yang berlatar organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Eksistensi mereka itu dapat dilihat dari sejumlah kegiatan keagamaan yang hidup dan berkembang di desa Paseban mulai dari pengajian rutin, majlis ta'lim, kelompok pengajian Ibu-ibu Aisyiyah (Muhammadiyah), tahlilan, yasinan, diba'an, Muslimatan, istighatsah (NU).

Melalui aneka asosiasi sipil Islam lokal tersebut, elit santri memainkan peran sentral dalam memperkuat basis gerakan sosial kontra tambang. Mereka memanfaatkan asosiasi itu sebagai ruang untuk mensosialisasikan, mengomunikasikan, dan mentransformasikan gagasan-gagasan tentang plus minus tambang bagi warga masyarakat desa. Penjelasan elit agama yang dikaitkan dengan ajaran agama seperti menjaga sumberdaya alam pesisir yang merupakan karunia Allah sebagai bagian dari kewajiban dan merupakan bentuk riil dari jihad, memudahkan warga untuk memahami dan akhirnya mau bergabung dengan gerakan kontra tambang. Saat bersamaan, elit agama turut memfasilitasi kalangan aktivis dari NGOs yang memang lebih paham mengenai persoalan tambang, untuk memanfaatkan beragam asosiasi itu sebagai panggung dalam memberikan pengetahuan dan peyadaran kepada warga. (H. Harun, Wawancara, 7 September 2016)

Aktivis mahasiswa berlatar santri tercatat pula sebagai aktor penting dalam gerakan sosial kontra tambang di Pase-

ban. Sebenarnya, keterlibatan aktivis mahasiswa dalam gerakan sosial kontra tambang, sudah berlangsung lama. Sejak ada rencana dari pemerintah kabupaten untuk melakukan eksplorasi tambang emas di daerah Silo, aktivis mahasiswa sudah tampil sebagai aktor gerakan dalam melakukan protes, penolakan dan perlawanan terhadap tambang. Mereka turut terlibat memperkuat barisan massa dalam melakukan demonstrasi besar-besaran dan berkelanjutan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Jember. Mahasiswa juga terlibat dalam melakukan negosiasi dan advokasi di tingkat kebijakan dengan mendesak anggota dewan untuk ikut cawe-cawe (berpeperan serta) dalam membantu untuk memperjuangkan regulasi pengelolaan sumberdaya alam, terutama tambang, yang lebih berpihak kepada nasib rakyat kecil. (Ahmad Taufik, Wawancara, 20 Oktober 2016)

Sebagian dari aktivis mahasiswa ada yang *concern* untuk melakukan pendampingan dan pendidikan kewargaan terkait dengan soal tambang. Mereka terjun ke Paseban secara regular untuk melakukan diskusi dan pembelajaran politik dengan warga tentang dampak tambang bagi lingkungan kehidupan warga masyarakat Paseban. Dalam forum pendidikan kewargaan (civic education), mereka mengajak warga untuk menonton bersama film dokumenter yang berkaitan dengan tambang. Dari kegiatan pendampingan dan pendidikan populer itulah, masyarakat mendapatkan pengetahuan baru tentang dampak tambang dan apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya. Hal ini diakui sendiri oleh warga masyarakat Paseban yang semakin mantap untuk ikut bertanggung jawab dalam mengelola dan melindungi kawasan pesisir dari ancaman penambangan. (Lasidi, Wawancara, 26 Oktober dan 5 Nopember 2016)

Keterlibatan aktivis mahasiswa dalam gerakan kontra tambang di Paseban, merupakan bagian dari tindak lanjut perjuangan mereka dalam memperjuangkan nasib masyarakat kecil di Jember agar tidak bernasib sama seperti warga masyarakat di kawasan tambang lainnya seperti Freeport,

Newmont, dan lain-lain. Jangan sampai pertimbangan praktis pemerintah kabupaten untuk meningkatkan APBD justru mengorbankan kepentingan sebagian besar masyarakat Jember. Terlebih rencana pengelolaan tambang sama sekali tidak melibatkan aspirasi dan partisipasi warga masyarakat desa. Sejauh ini, pemerintah belum bisa dipercaya sepenuhnya dalam pengelolaan sumberdaya alam potensial. Dalam prakteknya, pemerintah lebih banyak berpihak kepada kepentingan pemodal yang dapat menawarkan gula-gula (keuntungan material) kepada rezim penguasa dibandingkan memikirkan nasib masyarakat banyak. Karena itulah, kebijakan apapun menyangkut tata kelola tambang, harus kita tolak. (Hanif, Wawancara, 5 Nopember 2016)

Aktivis santri yang bergerak dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun Non-Government Organizations (NGOs, memiliki sikap dan posisi yang relatif sama dalam menyikapi tambang. Mereka bersikap tegas dalam menolak kebijakan pemerintah soal tambang. Tidak sebatas pada tataran wacana, mereka juga terlibat aksi-aksi kolektif untuk menentang tambang di Paseban. SD Inpres dan GNKLNU (Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Nahdlatul Ulama), merupakan dua organisasi sipil Islam yang menjadi kendaraan para aktivis santri dalam menyuarakan penolakan tambang. (Wawancara dengan Itqan, 15 Nopember 2016 dan Nur Hasan, 21 Nopember 2016)

Sementara itu, peran Pengurus Cabang NU dalam memperkuat legitimasi gerakan masyarakat sipil dalam menolak tambang tidak bisa dipandang kecil. Di Jember terdapat dua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), yaitu PCNU Jember dan PCNU Kencong. Keduanya memiliki saham penting dalam gerakan sosial kontra tambang. Keduanya kompak terlibat dalam memperkuat gerakan sosial kontra tambang yang dilakukan oleh warga masyarakat Paseban bersama elemen-elemen masyarakat sipil. Dalam sebuah konferensi pers, kedua elit organisasi memberikan maklumat agar peme-

rintah mendengarkan aspirasi masyarakat bawah dan segera menarik kebijakannya untuk menghentikan eksplorasi tambang pasir besi di Paseban. Menurut mereka eksplorasi tambang hanya memberikan solusi jangka pendek bagi peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam jangka panjang, tambang hanya akan memberikan kesengsaraan (bukan kesejahteraan) bagi masyarakat Jember pada umumnya. Singkatnya, tambang lebih banyak madharatnya ketimbang mashlahatnya (FGD dengan aktivis PCNU Kencong, 4 Nopember 2016 dan PCNU Jember, 10 Nopember 2016).

Bentuk-Bentuk Perlawanan

Keterlibatan intelektual kampus dalam gerakan sosial kontra tambang di Paseban tidak terjadi secara instan dan bersifat temporer. Sejak muncul rumor tentang tambang pasir besi, sejumlah aktivis santri, sudah mulai terlibat dalam diskursus internal. Kebetulan jarak antara gerakan sosial kontra tambang di Silo (2000-2005), berdekatan jaraknya dengan isu penambangan pasir besi di Paseban di mana rumor-nya sudah muncul ke permukaan pada 2005. Karena itu, semangat untuk mengawal gerakan sosial menolak berbagai bentuk eksplorasi sumberdaya alam yang tidak pro-rakyat, masih cukup hangat di kalangan intelektual kampus.

Aksi perlawanan yang dilakukan oleh para aktivis santri dilakukan melalui beragam bentuk di antaranya adalah demonstrasi massa. Aksi ini dilakukan di sejumlah tempat seperti depan pendopo kabupaten dan gedung DPRD Jember. Dalam aksinya, mereka mengusung beragam wacana, salah satunya ialah bahwa tambang lebih banyak mahdaratnya dibandingkan mashlahatnya bagi kesejahteraan warga masyarakat Paseban. Dengan isu inilah, mereka berusaha untuk memengaruhi opini publik masyarakat Jember pada umumnya untuk ikut terlibat mendukung gerakan sosialnya.

Selain itu, kalangan aktivis santri juga ikut terlibat dalam aksi demonstrasi bersama-sama warga desa di depan balai desa

Paseban. Berbeda dengan aksi demonstrasi di kabupaten dan depan DPRD, aksi massa di desa berlangsung secara radikal dan anarkis. Dalam beberapa demonstrasi, aktivis dan warga yang berdemonstrasi bahkan melakukan penyegelan balai desa yang mengakibatkan pelayanan administrasi desa lumpuh total dan terpaksa harus dipindahkan ke kecamatan. Selain itu, warga yang terlanjur marah juga terlibat dalam aksi pengrusakan berbagai properti, perlengkapan dan kendaraan yang diduga milik investor. Pendekatan ini digunakan sebagai strategi untuk mempercepat proses negosiasi, ketimbang yang bisa ditawarkan oleh instrumen-instrumen politik lainnya seperti perjuangan lewat jalur hukum (Lay: 137-138).

Keterlibatan aktivis santri tidak hanya diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi heroik di lapangan dalam bentuk demonstrasi massa. Terkoneksi dengan aktor-aktor gerakan di tingkat desa, mereka pun turut memainkan peran sentral dalam mengedukasi warga (civic education) akan hak-hak dan peran politik yang semestinya dilakukan. Terjun ke lapangan, membaur dan berdialog dengan elemen warga masyarakat Paseban, untuk mencari solusi terbaik dari rencana penambangan oleh pihak swasta, menjadi bagian dari aktivitas sosial yang dilakukan oleh kalangan kampus. (H. Harun, Wawancara, 7 September 2016)

Saat itu, sebagian besar warga masyarakat Paseban belum banyak yang peduli dengan rencana eksplorasi tambang pasir besi. Pada umumnya, warga juga belum memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih komprehensif mengenai dampak dari penambangan. Di tengah kerisauan sebagian tokoh masyarakat dan kepasifan sebagian besar warga Paseban dalam menyikapi rencana penambangan, kalangan aktivis mulai melakukan sosialisasi dan penyadaran kritis kepada segenap elemen warga masyarakat Paseban. Wacana yang diframing dan disosialisasikan oleh kalangan aktivis kepada warga banyak berkaitan dengan dampak tambang terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Dalam mensosialisasikan bahaya tambang,

kalangan aktivis santri mengajak serta warga masyarakat untuk nonton bareng (nobar) video dan film documenter soal tambang. Kasus Freeport, Newmont, Lapindo, dan lain-lain, merupakan sejumlah contoh yang disosialisasikan ke warga melalui pemutaran video film. Setelahnya, warga diajak mendiskusikan dan mengambil hikmah dari kejadian-kejadian sebagaimana dilihat dalam video tersebut. (Hermanto, Hanif dan Saiful, Wawancara, 30 Oktober 2016)

Sosialisasi sendiri dilakukan kalangan aktivis melalui forum majelis ta'lim --pengajian, yasinan, tahlil, Muslimatan--, kelompok tani, warung kopi, dan berbagai forum warga. Melalui sosialisasi yang sekaligus menjadi sarana pendidikan politik kewargaan (civic education) inilah, lambat laun warga mulai menyadari pentingnya menjaga dan melindungi serta mengelola sumberdaya pesisir secara arif dan bertanggung jawab. Dalam waktu yang relatif panjang dan berkelanjutan, warga kian memiliki kesadaran kritis bahwa memelihara lingkungan yang merupakan berkah dan karunia dari Allah, jauh lebih banyak mendatangkan kemaslahatan bagi keberlangsungan kehidupan warga masyarakat Paseban. Dari serangkaian sosialisasi inilah terbentuk asosiasi warga Paseban peduli lingkungan dan anti-tambang. Tanpa intervensi dari kalangan aktivis yang sudah melakukan sosialisasi dan pendidikan politik, hasrat pemerintah bersama pemodal dalam eksplorasi tambang pasir di Paseban, hampir bisa dipastikan, akan berjalan mulus tanpa banyak rintangan dan penolakan dari masyarakat. (Lasidi, Irfanudin, dan Faisol, Wawancara 26 Oktober 2016)

Peran-peran advokasi dan pendampingan terhadap nasib warga masyarakat Paseban yang terlibat dalam aksi perlawanan kontra tambang tidak ketinggalan dilakukan pula oleh aktivis santri. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sejumlah aksi kolektif anarkhis yang dilakukan oleh elemen warga masyarakat Paseban, berujung pada penahanan sebagian warga. Tidak kuang dari enam orang warga Paseban yang

ditahan di rumah tahanan selama persidangan dan setelah menjalani vonis hakim. Dalam konteks inilah, kaum santri melakukan advokasi dan pendampingan hukum kepada para korban.

Pembelaan nasib warga Paseban yang dilakukan aktivis santri juga dengan cara melakukan perubahan terhadap regulasi soal tambang. Melalui para politisi di parlemen yang kontra tambang, aktivis santri melakukan lobi dan negosiasi agar mengoreksi kebijakan bupati dalam memberikan perizinan kepada pihak pemodal untuk eksplorasi tambang. Menurut kalangan aktivis santri, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tambang tidak dilakukan melalui mekanisme yang benar. Hasil kajian AMDAL, misalnya, pemerintah dinilai menempuh jalan pintas dengan meminta ahli dari perguruan tinggi untuk membuat kajian AMDAL yang hasilnya memberikan penilaian kelayakan terhadap pengelolaan tambang. Singkatnya, persyaratan tentang AMDAL diperoleh melalui kajian pesanan. (Taufik, Wawancara, 30 Oktober 2016)

Lebih jauh, advokasi kebijakan dilakukan pula oleh kalangan aktivis kampus dalam perumusan peraturan dan perundangan menyangkut RT/RW dan Undang-undang Desa. Dalam kedua kasus ini, kalangan aktivis santri sangat konsen melakukan pengawalan dan memberikan masukan agar hasil dari peraturan perundangan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Sebagai catatan, keterlibatan kalangan aktivis santri yang juga didukung oleh sebagian politisi di parlemen yang kontra tambang, tidaklah cukup mudah memberikan poin-poin masukan. Hal ini dikarenakan format peraturan RT/RW dan Undang-undang Desa juga melibatkan kebijakan nasional. Pada akhirnya, produk RT/RW dan Undang-undang Desa yang disahkan pemerintah pusat dan berlaku bagi pemerintah daerah, masih memiliki celah yang cukup luas akan intervensi kekuatan pasar. (Saiful dan Adzkiya, Wawancara, 30 Oktober 2016)

Pluralitas Kepentingan

Kalangan elit agama, intelektual dan aktivis santri menyadari betul akan posisi dan peran yang harus dilakukannya dalam kehidupan sosial. Sebagai agen-agen agama terdidik, mereka merasa bertanggung jawab terhadap berbagai problema sosial, politik dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Karena itu, ketika terjadi persoalan sosial yang tengah dihadapi oleh warga masyarakat, mereka mau tidak mau, merasa terpanggil untuk ikut mencarikan solusinya. Dalam konteks demikian inilah, keterlibatan kaum santri dalam memecahkan berbagai problema sosial itu bukan semata-mata untuk –meminjam istilah Gramsci memenuhi kepentingan kelasnya –ataupun– dalam logika Marxisme—mengejar kepentingan duniawinya (material) yang bersifat praktis-pragmatis (Latif, 2005: 24-25).

Lebih dari itu, gerakan para aktivis santri diorientasikan pula pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang bersifat idealistik dalam dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pembentukan masyarakat madani atau masyarakat sipil yang berdaya, mandiri dan otonom dalam membangun relasinya dengan negara maupun pasar (Cohen & Arato, 1992: ix), masih tetap menjadi cita-cita yang diidealkan dan hendak dibumikan oleh segenap aktivis santri. Semua ini tidak akan pernah terwujud kalau tidak ada kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil. Negara agar tetap berpijak pada posisi dan perannya sebagai institusi politik tertinggi yang harus bertanggung jawab dalam mensejahterakan dan memberdayakan warganya secara partisipatif, harus terus dikontrol agar tidak melenceng dari khittahnya. Bagaimanapun, negara rentan dimanipulasi oleh rezim-rezimnya untuk memenuhi kepentingan sekelompok kecil dan mengabaikan kelompok besar warga Negara. (Wawancara dengan Nur Hasan, 7 Oktober 2016; Hermanto dan Saiful, 30 Oktober 2016)

Atas dasar pertimbangan dan kepentingan itulah, kaum santri bangkit untuk berperan serta dalam melakukan pembelaan terhadap perjuangan warga masyarakat Paseban yang

tengah menuntut keadilan soal tambang. Satu hal yang penting dicatat ialah bahwa tidak semua organ santri yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan, memilih sikap diam, pasif dan konservatif dalam menyikapi persoalan tambang. PCNU Kencong, misalnya, salah satu organisasi NU cabang di Jember, diketahui memiliki kedekatan dengan Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) dan sekaligus pendukung bupati terpilih (MZA Djalal) saat Pilkada (2009-2014). Namun, dalam kasus tambang Paseban, PCNU Kencong justru lebih memilih dan memihak kepada kepentingan warga masyarakat Paseban yang tidak menghendaki tambang dan sekaligus beroposisi dengan kekuasaan. Dalam pandangan mereka, penambangan pasir besi di Paseban akan membawa dampak negatif (madharat) lebih besar, terutama bagi kelangsungan hidup warga masyarakat Paseban yang nota bene sebagian besarnya adalah warga nahdliyin. (Wawancara dengan Kiai Sadid Jauhari, 27 September 2016; Kiai Pujiono, 20 September 2016; dan Gus Syef, 5 Desember 2016)

Di saat bersamaan, agen-agen pemerintah dan pemodal hilir mudik mendatangi para kiai, pengurus, dan elit-elit NU dengan membawa sejumlah penawaran menggiurkan. Dalam sejumlah kesempatan, mereka diajak agen pemerintah dan pemodal untuk mendiskusikan rencana eksplorasi tambang di Paseban. Mereka diyakinkan bahwa eksplorasi tambang di Paseban tidak akan sampai merusak ekologi pesisir dan merugikan kepentingan umum. Sebab, rencana penambangan sudah melalui serangkaian kajian terutama AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dengan melibatkan pakar di bidangnya. Dengan dibukanya penambangan, otomatis warga berkesempatan untuk mengakses pekerjaan dan kesejahteraannya dipastikan meningkat. Tidak sebatas itu, pihak pengelola tambang juga menjanjikan perbaikan jalan di desa Paseban, bantuan perbaikan tempat ibadah (masjid, mushalla), CSR bagi desa dan pesantren. (Wawancara dengan sejumlah PCNU Kencong, 5 Nopember 2016)

Sekalipun agen pemerintah bersama-sama pemilik modal terus menebarkan bujuk rayunya kepada sejumlah pengurus PCNU, para aktivis dan elit pesantren, namun mereka masih mengedepankan hati naruni mereka dengan tetap memilih untuk menolak semua intervensi kultural dari pihak-pihak berkepentingan. Menurut pengurus PCNU dan elemen-elemen nahdliyin lainnya, sangat kompak dan solid dalam menyokong gerakan warga dalam menolak kebijakan pemerintah daerah. Bahkan, pengurus dan kiai pesantren turut memerintahkan para aktivis santrinya untuk ikut mengonsolidasikan kekuatannya dalam menyokong gerakan sosial kontra tambang. Di antara sejumlah santri ada yang aktif terlibat dalam demonstrasi massa baik di desa Paseban maupun di Pemkab dan DPRD Jember. (Wawancara dengan PCNU Kencong, 5 Nopember 2016)

Pertimbangan serupa juga dikemukakan para aktivis santri dari berbagai Ornop, Ormas, dan LSM. Hampir semua aktivis santri dari berbagai latar organisasi sosial-keagamaan (NU, GNKLNU, PMII, SD Inpres), memberikan argumentasi bahwa tekad mereka untuk ikut terlibat dalam melakukan perlawanan terhadap tambang, didasarkan pada pembelaan kepentingan masyarakat kecil. Pembelaan mereka bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan primordial bahwa korban terbesar dari pertambangan adalah warga masyarakat Paseban yang mayoritas nahdliyin. Setiap bentuk penambangan yang eksploitatif dan tidak memihak kepada kepentingan rakyat, pasti akan mereka tolak. Perlawanan mereka tidak akan berhenti hanya semata-mata ada *sharing* atau bagi hasil atau keuntungan dari pendapatan usaha produksi tambang yang lebih berimbang dengan kalangan pemilik modal dan penguasa. (Wawancara dengan sejumlah aktivis PMII Cabang Jember, 7 Desember 2016)

Selain itu, dimensi ekologis menjadi wacana yang banyak diperbincangkan pula dan bahkan menjadi salah satu isu sentral dalam gerakan sosial kontra tambang di Paseban.

Maraknya gerakan sosial yang mengambil fokus pada lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari berbagai praktek eksploitatif pengelolaan lingkungan alam oleh manusia. Terdapat dua aliran utama yang turut mewarnai wacana pemikiran para aktor gerakan lingkungan, pertama, konsep yang meletakkan manusia berada pada matra tertinggi di antara makhluk-makhluk hidup dan benda di alam semesta (antroposentrisme). Kedua, ekosentrisme yakni konsep yang meletakkan bahwa manusia dan makhluk hidup serta benda di alam semesta ini memiliki kedudukan sejajar (Situmorang: 66-67).

Wacana pemikiran ekosentrisme menekankan bahwa sudah selayaknya manusia tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari makhluk hidup dan benda alam lainnya dan karenanya merasa berhak untuk mengatur, menata dan mengeksplorasi sesuai dengan kehendaknya. Sebaliknya, manusia —yang hakekatnya memiliki posisi sejajar—memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan untuk keberlanjutan kehidupannya sendiri dan secara bersamaan bertujuan untuk memenuhi hak makhluk hidup lainnya untuk dihargai keberadaannya. Bagaimanapun antara manusia dan makhluk hidup lainnya saling membutuhkan dalam suatu sistem besar alam semesta. Eksistensi kehidupan bukan monopoli manusia semata, tetapi juga hak makhluk hidup lainnya (Situmorang: 66).

Di Indonesia sendiri, gerakan sosial berbasis lingkungan (ekologi) berkembang pesat. Berbagai NGO ataupun LSM yang memiliki ruang lingkup gerakan lingkungan, terbilang cukup banyak. Satu LSM yang memang *concern* dan sudah memiliki reputasi nasional dalam gerakan lingkungan adalah wahana lingkungan hidup (Walhi). Di lingkungan organisasi Islam tradisional (NU), terdapat organisasi non-struktural yang bergerak dalam menangani persoalan lingkungan, yaitu Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nahdlatul Ulama (GNKLNU). Organisasi civil society ini diisi oleh sejumlah aktivis santri yang sangat progresif. Dalam gerakan sosial kontra tambang baik di Silo maupun Paseban, aktivis GNKLNU

tercatat sebagai aktor gerakan yang paling vocal dan radikal dalam menentang kebijakan eksplorasi tambang. Bagi mereka, tambang akan menghancurkan ekologi hutan dan pesisir yang menjadi penyangga keseimbangan kawasan. Kehancuran hutan dan lingkungan pesisir juga akan berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat Jember pada umumnya. (Wawancara dengan aktivis GNKLNU, 7 Nopember 2016)

Sekalipun gerakan sosial kontra tambang tidak mengusung satu identitas seperti gerakan ekologi (deep ecology maupun eco sosialisme), namun isu lingkungan cukup mewarnai pula dalam aksi-aksi kolektif kaum santri tersebut. Komitmen kaum santri untuk terlibat dalam gerakan perlawanan di Paseban, berkaitan erat dengan pertimbangan dan kepentingan untuk menjaga eksistensi ekologi pesisir. Bagaimanapun, kawasan pesisir pantai selatan Jember itu, telah menjadi denyut nadi kehidupan warga masyarakat Paseban. Sekalipun tidak semua warga Paseban hidup di sekitar dan menggantungkan hidupnya dari kawasan pesisir, sebagian besar dari mereka, termasuk warga yang ajuh dari pesisir, tetap saja memiliki kesadaran ekologi pesisir tinggi. Dalam alam kesadaran mereka, pesisir merupakan bagian dari kawasan sosio-kultural dan geografis Paseban. Tidak sedikit dari warga Paseban yang berprofesi sebagai petani sawah, ikut terlibat dalam melakukan ritual petik laut yang diselenggarakan oleh para nelayan dan warga di sekitar pesisir. Demikian halnya dalam perawatan kawasan pesisir melalui penghijauan, warga Paseban ikut serta terlibat di dalamnya. Hal ini mengindikasikan bahwa warga masyarakat desa Paseban, tanpa terkecuali masih memiliki perhatian dan kesadaran ekologis terhadap kawasan pesisir pantai Paseban. Gambaran lebih jauh tentang kesadaran ekologis warga masyarakat Paseban dapat dibaca pada sub-bab ekologi pesisir Paseban.

Kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam potensial tercatat sebagai alasan penting yang mendorong kaum santri terlibat dalam gerakan sosial

kontra tambang di Paseban. Hampir semua elemen santri berpendapat bahwa rencana pemerintah kabupaten memberikan izin kepada pihak swasta untuk eksplorasi tambang dinilai sebagai kebijakan yang tidak pro-rakyat. Menurut mereka, kebijakan semacam itu, dinilai sarat dengan kepentingan pasar (neo-liberalisme) dan mengabaikan kepentingan publik. Dalam banyak kasus, pengelolaan tambang sebatas menyejahterakan sekelompok elit penguasa dan pemodal semata, serta membawa kesengsaraan bagi warga masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah. Kalaupun industri tambang dapat memberi akses pekerjaan kepada warga masyarakat desa, bisa dipastikan, jenis pekerjaan yang mereka dapatkan tidak lain adalah pekerjaan di sektor informal, sebagai pekerja kasar (hard worker) dengan upah yang minim. (Nur Hasan, Wawancara 7 Oktober 2016)

Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah (negara) soal tambang dinilai tidak ada yang berberpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Wacana yang dilontarkan oleh pemerintah bahwa pembagian hasil (sharing) dari pengelolaan tambang akan dikembalikan kepada dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dinilai kalangan aktivis tak lebih sebagai retorika belaka. Tidak ada ceritanya daerah yang kaya tambang seperti Aceh (Exxon Mobil), Nusa Tenggara Barat/NTB (Newmont), Papua (Freeport), dan daerah lainnya, masyarakatnya sejahtera. Sebaliknya, kemiskinan dan keterbelakangan yang justru menghiasi wajah dominan kehidupan warga masyarakat yang tinggal di daerah-daerah sekitar pertambangan. (Wawancara dengan aktivis PMII cabang Jember, 7 Nopember 2016)

Kesimpulan

Kasus eksplorasi sumberdaya alam tambang pasir di kawasan pesisir Paseban, termasuk salah satu persoalan yang mendapatkan perhatian besar dari kalangan santri di Jember. Sejumlah elemen santri baik yang berlatas kampus, pesantren, LSM/NGOs, tercatat sebagai aktor utama yang berperan

penting dalam melancarkan aksi-aksi protes (mulai dari demonstrasi sampai advokasi) terhadap kebijakan pemerintah dalam hal eksplorasi tambang. Keterlibatan mereka bersama-sama dengan elemen-elemen *civil society* lainnya dalam aksi-aksi protes terhadap tambang, turut mengafirmasi posisi mereka sebagai agen *civil society* progresif dalam mendesakkan perubahan sosial. Kendatipun corak kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat dalam aksi protes itu beragam, namun reposisi mereka yang kontradiktif dalam relasinya dengan kekuatan dominatif (negara dan pasar), dapat dikatakan cukup progresif.

Pada akhirnya, aksi-aksi protes yang dilakukan kaum santri bersama kekuatan *civil society* lainnya, berhasil mendesakkan agenda perubahan. Bagaimapun, pemerintah dan pemilik modal, tidak lagi meneruskan rencananya untuk melakukan eksplorasi tambang pasir di Paseban. Sampai pergantian rezim kepemimpinan, rencana eksplorasi tambang tidak lagi dilanjutkan. Meskipun muncul lagi sayup-sayup isu tentang dibukanya kembali kran untuk pengelolaan sumberdaya alam pesisir potensial itu, namun faktanya pemerintah belum mengeluarkan izin resmi lagi. Fakta demikian ini turut mengafirmasi bahwa kaum santri tetap menjadi pilar *civil society* yang berperan penting dalam menentukan agenda perubahan dan demokratisasi.

Daftar Pustaka

- Adas, Michael. 1988. *Ratu Adil: Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa*, (terj. M. Tohir Effendi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Qurtuby, Sumanto. 2013. "Public Islam in Southeast Asia: Late Modernity, Resurgent Religion, and Muslim Politics," *Studia Islamika*, Vol. 20, No. 3, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Anderson, Perry. 1976. "The Antinomies of Antonio Gramsci", dalam *New Left Review* 100.
- Bates, R.H. 1981. *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis*. Berkeley: University of Agricultural Policies.

- Bayat, Asef. 2007. *Making Islam Democratic: Sosial Movement and the Post-Islamist Turn*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Budiman, Arief. 1984. "Peranan Mahasiswa sebagai Intelegensia", dalam Aswab Mahasin dan Ismed Natsir (ed.) *Cendekiawan dan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Burhanudin, Jajat. 2012. *Ulama dan Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Bush, Robin. 2009. *Nahdlatul Ulama and the Struggle for Power within Islam and Politics in Indonesia*. Singapore: ISEAS.
- Casanova, Jose. 1994. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: The University of Chicago Press.
- _____. 2001. "Civil Society and Religion: Retrospective Reflections on Catholicism and Prospective Reflections on Islam". *Sosial Research* 68: 4.
- _____. 2010. "Rethinking Public Religion", in *Rethinking Religion and World Affairs*, edited by Timothy Samuel Shah, Alfred Stepan, and Monica Duffy Toft, 25-35, New York: Oxford University Press.
- Cohen, Jean L. dan Andrew Arato. 1992. *Civil Society and Political Theory*. Cambridge: Mass: MIT Press.
- Engineer, Asghar Ali. 2009. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eisinger, Peter. 1973. "The Conditions of Protest Behavior in American Cities", *American Political Review* 67.
- Fakih, Mansour. 2002. *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. 2009. *Problematika Utama Dalam Teori Sosial Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial*. Terj. Dariyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from The Prison Notebook*, editor dan terjemahan Quinten Hoare dan Geoffrey Nowell Smith, London: Lawrence and Wishart.
- Gunawan, Asep dan Dewi Nurjulianti (ed.). 1999. *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society, Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*. Jakarta: TAF dan LSAF
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES.
- Haryatmoko. 2003. "Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa: Landasan Teoritis Gerakan Sosial Menurut Pierre Bourdieu", dalam *Basis* Nomor 11-12, Tahun ke-52, November-Desember.

- Hasan, Noorhaidi. 2012. *Islam Politik di Dunia Kontemporer, Konsep, Geneologi, dan Teori*. Yogyakarta: Suka Press.
- Hefner, Robert W. 2000. *Civil Islam, Muslim and Democratization in Indonesia*. United Kingdom: Princeton University Press.
- _____. 2001. "Public Islam and the Problem of Democratization," *Sociology of Religion*.
- Hery Santoso. 2004. *Perlawanan di Simpang Jalan, Kontes Harian di Desa-desa Sekitar Hutan*, Yogyakarta: Damar.
- Hiariej, Erich. 2004. "Pendahuluan", dalam Erich Hiariej, Ucu Martono, Ahmad Musyaddad (ed.) *Politik Transisi Pasca Soeharto*, Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Hikam, Muhammad A.S. 1996. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Protes Movement in Rural Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- _____. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kleden, Ignas. 1985. Agama dan Perubahan Sosial dalam Agama dan Tantangan Zaman: *Pilihan Artikel Prisma 1975-1984*. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo. 2002. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta: Bentang.
- Kurniawan, Luthfi J. dan Hesti Puspitosari. 2012. *Negara, Civil Society dan Demokratisasi*. Malang: Intrins Publishing.
- Laclau, Ernesto dan Chantal Mouffe. 2008. *Hegemoni dan Strategi Sosialis, Post-Marxisme dan Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Latif, Yudi. 2005. *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Geneologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan.
- Maliki, Zaenuddin. 2004. *Agama priyayi, Makna Agama di Tangan Elit Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Melucci, Alberto. 1996. *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Popkin, S.L. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Berkeley: University of California Press.
- Rahardjo, M. Dawam. 1999. "Gerakan Keagamaan dan Penguatan Civil Society, Kata Pengantar", dalam Asep Gunawan dan Dewi Nurjulianti (ed.) *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society, Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*. Jakarta: TAF dan LSAF.
- Ritzer, George. 2009. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Radjawali Pers.

- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Robison, Richard dan Vedi R. Hadiz. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The politics of Oligarchy in an Age of Markets*, Roudledge. University of Hong Kong Southeast Asia Series.
- Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of Peasant*. New Haven: Yale University Press.
- Singh, Rajendra. 2001. *Sosial Movement, Old and New: A Post Modernist Critique*. New Delhi, Thousand Oaks, London: Sage Publications.
- Situmorang, Abdul Wahib. 2013. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Smelser, Neil J. 1962. *Theory of Collective Behavior*. New York: The Free Press.
- Snow, David. 2004. "Framing Process, Ideology dan Discursive Fields", dalam *The Blackwell Companion to Sosial Movements*. Oxford, UK: Blackwell Publishing.
- Swidler, Ann. 2002. "Cultural Power and Sosial Movement", dalam *Cultural Sociology*. Lyn Blacwell, UK, Spillman.
- Tarrow, Sydeny. 1998. *Power in Movement: Sosial Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University.
- Zuhro, Siti. 2012. Negara, Demokrasi, dan Civil Society, dalam Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, *Negara, Civil Society dan Demokratisasi*. Malang: Intrans Publisng.